



IKPA: Raport Pelaksanaan Anggaran

APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal perlu untuk terus dikawal dalam pelaksanaannya agar fungsi APBN berjalan dengan semestinya. Salah satu strategi yang dijalankan adalah monitoring dan evaluasi (monev) atas kinerja pelaksanaan anggaran. Agar ukuran yang digunakan dalam monev untuk menilai kinerja pelaksanaan anggaran memiliki standar yang sama, maka diperlukan suatu indikator dengan formulasi yang mewakili aspek kualitas perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan anggaran. Untuk itu, pemerintah telah membuat terobosan dengan menetapkan implementasi indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) pada setiap satuan kerja (satker) dan kementerian/lembaga (K/L) yang mengelola dana APBN.

IKPA merupakan semacam raport bagi satker atas pelaksanaan anggaran di lingkup masing-masing. Melalui raport ini akan terlihat mana saja satker yang bernilai IKPA sangat baik, baik, cukup atau rendah. Bagi satker yang memiliki nilai raport atau IKPA yang sangat baik tentu akan memperoleh *reward*. Sebaliknya, bagi satker dengan nilai IKPA yang rendah, akan menjadi obyek pembinaan oleh unit pembina K/L masing-masing dan oleh unit DJPb, baik Kanwil DJPb maupun KPPN. Sehingga IKPA telah memudahkan dan menjadi *tools* bagi kementerian keuangan dan kementerian teknis dalam monev pelaksanaan anggaran. Dari nilai setiap indikator pada IKPA, unit pembina dapat segera mengetahui permasalahan yang dihadapi satker dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerjanya.

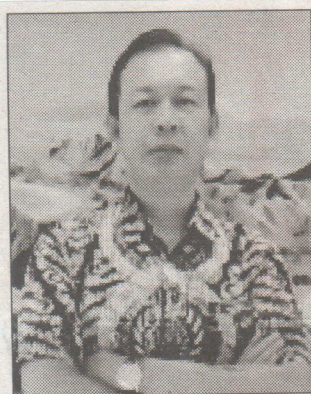
IKPA pertama kali digunakan pada tahun 2015 untuk penilaian kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2014 dengan menggunakan tujuh indikator kinerja. Dengan pemanfaatan teknologi, pada tahun 2018 penilaian IKPA berhasil diintegrasikan pada aplikasi OMSPAN. Kementerian

Keuangan dalam hal ini DJPb terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan atas indikator-indikator kinerja tersebut. Pada awal tahun 2022, pemerintah melakukan reformulasi IKPA secara struktural (aspek dan variabel) dengan fokus pada akselerasi belanja dan pencapaian output.

Indikator Penilaian IKPA

Hampir setiap tahun, tantangan pelaksanaan anggaran dihadapkan pada kondisi yang sama. DJPb telah mengidentifikasi beberapa tantangan tersebut, yaitu perencanaan yang kurang baik, alokasi yang kurang wajar, pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal, realisasi tidak sesuai rencana penarikan dana, penyerapan tidak proporsional, pencapaian output di bawah target, pengelolaan keuangan yang tidak *compliance*, serta kendala teknis operasional dan kebijakan. Atas dasar kondisi tersebut, formula indikator pada penilaian IKPA disusun sedemikian rupa sehingga dapat mengukur tantangan yang dihadapi setiap satker pengelola anggaran.

Merujuk pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA memiliki delapan indikator yang dikelompokkan dalam tiga aspek. Pada aspek perencanaan anggaran terdapat indikator revisi dokumen isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan deviasi halaman III DIPA. Pada aspek pelaksanaan anggaran diwakili lima indikator, yaitu penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan uang persediaan & tambahan uang persediaan, dan dispensasi surat perintah membayar (SPM). Sedangkan pada aspek hasil pelaksanaan anggaran terdapat satu indikator, yaitu capaian output. Dari delapan indikator ditetapkan bobot masing-masing, dengan bobot terbesar pada capaian output sebesar 25 persen dan penyerapan anggaran 20 persen.



Oleh:
Sigid Mulyadi, S.E., M.M.

memiliki nilai kinerja pelaksanaan anggaran dibawah target 89. Tentu, hal ini perlu menjadi perhatian baik oleh pihak satker maupun unit pembina.

Sebagai upaya memberikan penekanan dan dorongan kepada satker atas capaian IKPA, Kanwil DJPb Kalbar menetapkan target IKPA yang lebih tinggi dari target nasional dan lebih menantang, yaitu sebesar 97. Pada capaian IKPA triwulan III terdapat 23,65 persen satker yang telah berhasil memperoleh nilai 97. Diharapkan pada IKPA triwulan IV, satker yang meraih nilai 97 bertambah banyak. Untuk itu, Kanwil DJPb Kalbar bersama dengan KPPN melakukan berbagai inisiatif dan upaya untuk mendorong satker dalam meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan nilai IKPA.

Sejatinya, kunci utama untuk capaian IKPA yang berkualitas

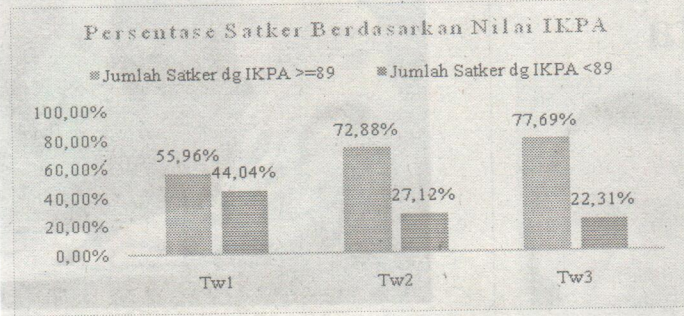
atau data capaian IKPA yang masih rendah, maka dia perlu segera melakukan konsolidasi internal untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Dengan kata lain, pada semua level pengelola keuangan harus menyadari dan memahami bahwa pengelolaan APBN itu harus ditangani secara profesional. Karena sesungguhnya salah satu asas pengelolaan keuangan negara adalah profesionalitas. Dan nilai IKPA menjadi salah satu ukuran tingkat profesionalitas tersebut.

Sementara itu, selain APBN, APBD juga menjadi bagian dari instrumen kebijakan fiskal. Jika dalam pelaksanaan APBN telah diimplementasikan IKPA sebagai raport satker, maka seharusnya penilaian yang sama juga diberlakukan pada pelaksanaan APBD. Sehingga, Gubernur, Bupati, atau Walikota dapat menilai kinerja bawahannya tidak hanya berdasarkan angka penyerapan anggaran, melainkan juga melihat dari beberapa indikator lain sebagaimana dalam IKPA. Hal ini juga dimaksudkan agar ukuran kinerja pelaksanaan APBN dan APBD memiliki standar yang tidak jauh berbeda. Untuk itu, pemerintah daerah dapat mengadopsi penilaian IKPA sebagai alat *money* atas pelaksanaan dana APBD pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Atau Kemendagri selaku penyusun regulasi pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, dapat melakukan adaptasi penilaian IKPA dan mengatur implementasinya pada pelaksanaan APBD.**

** Penulis adalah Pengawas pada Kanwil DJPb Kalbar, Kementerian Keuangan.*

Capaian IKPA di Kalbar
Sesuai ketentuan, periode penilaian IKPA ditetapkan secara triwulanan. Berdasarkan data Kanwil DJPb Kalbar, diketahui nilai IKPA satker K/L tahun 2022 di Kalimantan Barat menunjukkan perkembangan nilai yang terus meningkat. Tahun ini target nasional nilai IKPA pada setiap satker ditetapkan sebesar 89. Pada triwulan I, jumlah satker yang berhasil mencapai target 89 sebesar 55,96 persen, sedangkan sebanyak

44,04 persen masih dibawah angka 89. Pada triwulan II, jumlah satker yang berhasil meraih target 89 mengalami peningkatan menjadi sebesar 72,88 persen dan kembali meningkat di triwulan III menjadi sebesar 77,69 persen.



Data diatas mengindikasikan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran pada satker K/L di Kalbar terus meningkat dan secara agregat nilai IKPA tingkat wilayah pada triwulan II dan III sudah berada diatas target 89. Hanya saja, data tersebut juga menunjukkan bahwa masih terdapat satker yang

adalah kepedulian pada level pimpinan. Para kepala satker atau kuasa pengguna anggaran (KPA) harus memahami tentang arti penting IKPA dan peran yang mesti mereka lakukan. Setiap bulan seorang KPA perlu untuk mengecek dan mengevaluasi capaian nilai IKPA. Apabila didapati laporan